

Respon Nasional dan Lokal Terhadap Globalisasi ✓✓

Paulus Wirutomo

Globalization is predicted to eliminate boundry between countries and nations in the world and it will create a global village. Globalization developed new trends such as the hegemony of transnational companies, the culture of modernity which are open to any new ideas and thoughts, and political tensions between nations due to the economic gaps.

Our society should neither be skeptic nor full supportive of globalization since globalization has its winner and loser. As a response to globalization, our society should strengthen normative, functional, and coercive national integrity. The idea of "Think globally and act locally" should be reviewed. We will not be able to response to globalization if we always maintain institutional and intellectual framework developed by globalization. We must have a development, which is based on our values. This is a development based on the whole aspects of society and there must be structural support for the following strategic values of self-sufficiency, national consensus, and anti corrupt practices.

Globalisasi

Setelah perang dingin usai, kapitalisme merajai dunia dan berkembanglah ideologi seperti neoliberalisme, *free trade* dan sejenisnya yang menjanjikan suatu global demokrasi yang berlandaskan pada multikulturalisme, karena komunikasi yang semakin intensif antar bangsa. Masa ini ditandai pula oleh semakin meningkatnya aliran dana, barang, dan informasi secara lebih bebas keseluruh pelosok dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan antar manusia diseluruh dunia bukan saja secara ekonomi tetapi juga politik (*governance*), sosial dan budaya. Globalisasi diramalkan juga akan memudahkan sekat-sekat yang memisahkan negara dan bangsa di dunia. Globalisasi menjadikan dunia sebuah "*global village*".

Interaksi intensif antar bangsa di dunia memang bukan hal baru, tetapi globalisasi merupakan gejala baru yang ditandai oleh:

- Pasar modal dunia, yang membuat modal tidak memiliki tanah air, investasi bisa dilakukan dimana saja.
- Alat teknologi baru, yang merubah intensitas komunikasi antar bangsa seluruh pelosok dunia. (internet, telpon, media massa dsb.)
- Aktor baru berupa organisasi bertingkat global (WTO, Global, NGO dsb). Yang memiliki kekuasaan sangat menentukan terhadap negara-negara di dunia.

- Aturan baru antar bangsa yang memiliki daya paksa terhadap semua negara (aturan multilateral seperti HAKI dsb.) (HDR 1997)

Dampak globalisasi pada kehidupan ekonomi

Globalisasi telah menghasilkan berbagai gejala baru seperti hegemoni dari perusahaan transnasional yang kini merupakan separuh dari unit ekonomi dunia. Dengan kata lain dunia sekarang mulai dikuasai oleh pengusaha! Perusahaan transnasional akan terus berkembang semaking kuat, mengembangkan sayapnya ke berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan dari pajak. Perusahaan dia ini juga memanfaatkan sistem transportasi dan informasi yang semakin canggih. Mereka dapat membuka lapangan kerja pada masyarakat lokal tetapi juga dapat menciptakan pengangguran massal seketika dengan pemutusan hubungan kerja. Produk mereka yang membanjir dapat merangsang budaya konsumtivisme termasuk di negara-negara miskin. Sejalan dengan itu berkembang pula "ekonomi hitam" (*black economy*) yang memproduksi serta memperdagangkan barang-barang haram atau berbahaya seperti senjata ilegal, obat bius dan psicotropika; perdagangan manusia, pornografi dsb. Ekonomi ini bahkan beromset sama besar dengan ekonomi biasa (legal). Hal ini menunjukkan bahwa masa depan kehidupan manusia tidak otomatis akan lebih baik dengan adanya globalisasi, apalagi bila dunia gagal menciptakan suatu globalisasi yang "beradab" (menjunjung tinggi martabat manusia).

Dampak budaya globalisasi

Globalisasi telah membuka kehidupan manusia di semua pelosok dunia terhadap budaya modern dan segala kreativitas terhadap aliran ide dan pengetahuan tetapi juga segala macam "sampah" yang dapat mengacaukan cara berpikir, berkonsumsi dalam kehidupan lokal mereka. Ilmu pengetahuan dikuasai dunia maju, kita hanya bisa memfoto-copy, bila peraturan hak cipta diterapkan dengan konsekwen, boleh jadi dunia akademis kita akan runtuh!

Dalam dunia yang semakin disibukkan oleh urusan materi, profesi di bidang pelayanan (*care*) kurang memperoleh perhatian (jururawat, guru, penitipan anak, pekerja sosial, pekerjaan rumah tangga dsb.), padahal ini amat penting bagi perkembangan kemanusiaan. Berkembangnya "*World Information Order*" yang menempatkan dunia ketiga dipinggiran, telah menciptakan "*media imperialism*" dan budaya pop yang telah mematikan kreativitas dan disorientasi budaya dan perilaku masyarakat. (data menunjukkan bahwa ekspor AS yang terbesar bukanlah benda teknologi tetapi benda "budaya" seperti: hiburan, musik, tari, *film*, buku dsb). Ada teori bahwa setelah dibanjiri produk asing, produk lokal akan berkembang dan akhirnya produk Barat akan tersaring. Di India hal itu telah terjadi (Bollywood menyaingi Hollywood) tetapi di Indonesia kreativitas dan kemampuan bersaing bangsa kita justru menjadi semakin merosot.

Huntington mengatakan bahwa setelah kejatuhan komunisme identitas penting suatu bangsa bukan lagi ideologi politik atau ekonomi tetapi budaya (etnisitas dan agama). Bangsa yang memiliki kedekatan budaya saling mendekat dan

cenderung memusuhi bangsa yang berbeda budaya. Agama justru dapat menjadi faktor permusuhan dan kekerasan, bukan kedamaian. Walaupun “*the Clash of Civilization*” belum terjadi seperti dibayangkan Huntington, namun berbagai kasus terorisme di dunia telah menunjukkan gejala ini.

Dampak di bidang politik

Proses globalisasi yang merambah hampir seluruh bidang kehidupan dan seluruh pelosok dunia, secara politis membutuhkan suatu “*stronger global governance*” agar memiliki pengaturan yang lebih tegas dan berwibawa demi menopang “etika moral” dunia yang serba baru. Globalisasi harus bersifat:

- Etis; tidak melanggar hak asasi,
- Merata: menyempitnya kesenjangan,
- Kebersamaan: mengurangi masyarakat terpinggir,
- Aman: mengurangi kerentanan dan gejolak sosial,
- Lestari: berkurangnya kerusakan alam,
- Maju; berkurangnya kemiskinan.

Globalisasi hanya akan memanaskan situasi politik dunia kecuali bila mampu memperkecil kesenjangan dan mengangkat martabat manusia.

Bagaimana sikap kita menghadapi globalisasi?

Kita tidak perlu menjadi “*hyperglobalizer*” yakni percaya bahwa globalisasi adalah suatu perubahan yang amat mendasar bagi manusia sehingga manusia akan kehilangan segala rutinitas, kebiasaan, tradisi yang telah ada, negara akan kehilangan eksistensinya (menjadi *boderless*) dsb. Akan tetapi, kita juga jangan bersikap “*sceptic*” yaitu menganggap globalisasi sama sekali bukan hal baru, tidak akan menciptakan perubahan mendasar, sehingga dapat kita abaikan. Sikap yang lebih proporsional adalah percaya bahwa globalisasi merupakan suatu gejala baru dan akan merubah banyak hal di dunia ini tetapi masih banyak jugal yang tetap bertahan seperti sediakala (*transformationlist*). Oleh karena itu sebagai suatu negara bangsa kita harus mempersiapkan diri secara tepat, karena “*globalization has its winner and its losers!*” Berbagai gejala saat ini telah menunjukkan bahwa kita telah terkalahkan. Kasus TKI misalnya, telah menunjukkan bahwa tenaga kerja kita “tidak laku” atau dihargai teramat murah di dunia internasional, kemampuan kita untuk menyiapkan keterampilan mereka dan melindungi mereka di luar negeri amat memprihatinkan, sementara tenaga kerja asing telah mendominasi negeri kita. Demikian pula kemampuan memproduksi kita, ekspor kita menurun terus, etos kerja, kreativitas, daya saing dan kemampuan menarik investasi amat rendah.

Bagaimana kondisi integrasi nasional kita?

Bila kita tetap ingin bertahan sebagai suatu negara-bangsa di masa globalisasi ini, maka kita perlu memperkuat integrasi nasional kita, baik dari segi "normative" (kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar, kesamaan cita-cita, solidaritas, rasa kebersamaan dsb.), dari segi "fungsional" adanya saling membutuhkan atau ketergantungan fungsional dari seluruh komponen bangsa, maupun dari segi "coersive" (adanya suatu kekuatan atau kewibawaan yang sanggup menjaga seluruh komponen bangsa untuk menyatu).

Setelah jatuhnya Orde Baru yang sangat bersifat koersif, bangsa kita saat ini nampaknya sedang mengalami krisis pada ketiga bidang itu:

- Semangat nasionalisme dan kesepakatan nilai antar kelompok dan golongan lemah (konflik antar suku, agama, partai, kampung, sekolah dsb.)
- Integrasi fungsional lemah (otonomi kita masih menghasilkan sikap yang eksklusif antar daerah, kurangnya semangat untuk saling bekerjasama memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara sinergis).
- Pamor TNI, Polisi dan Pemerintah pusat menurun, sehingga situasi sering menjadi anarkis. Kekuatan koersi memang harus dibatasi tetapi tidak boleh menghilangkan "kewibawaan".

Tingkat dan kualitas kesadaran berbangsa dari masyarakat kita juga cenderung memprihatinkan. Kita dapat mengelompokkan menjadi tiga golongan:

- Golongan rasional: yang hanya menekankan pada untung rugi (utilitarian atau oportunist), jumlahnya tidak banyak, tetapi cenderung bertambah terus.
- Golongan idealis: yang mendasarkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi (nilai nasionalisme, kesatuan, kerukunan, patriotisme dsb.). Jumlahnya masih agak banyak tetapi cenderung menurun seiring beralihnya generasi.
- Golongan tradisional: yang menganggap bahwa integrasi adalah otomatis, tidak perlu dipertanyakan lagi. Golongan ini berjumlah paling besar, (mungkin lebih dari 80%).

Di jaman globalisasi seperti ini tidak cukup bila integrasi nasional kita hanya didukung oleh golongan yang tradisional, untuk menjadi kuat kita membutuhkan golongan yang idealis, tetapi mampukah kita menciptakannya? Bila kita mengikuti kaum *rationalist*, maka kita akan cenderung membiarkan gejala separatisme. Negara kesatuan memang bukan *destiny*, tetapi uskah kita mengambil jalan separatisme sekarang juga? Apakah masyarakat daerah telah siap? Elit lokal tidak secara otomatis berhak mengklaim kekuasaan, seolah-olah mereka lebih baik dari pemimpin di pusat. Di masa awal penerapan otonomi daerah, ternyata banyak elit lokal yang tidak mampu mendengarkan "*silent majority*" di daerahnya. Mereka juga belum punya pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang memadai mengenai globalisasi.

Bagaimana kita melakukan perlawanan lokal?

Gustavo dan Prakash (Lechner 2004 h. 410) mengemukakan bahwa kita tidak akan dapat menjadi otonom dan tidak mampu melawan globalisasi bila kita selalu berpikir dalam skala global. Dengan kata lain kita tak akan dapat melepaskan diri dari ketidakberdayaan bila kita selalu berpikir dalam "*institutional and intellectual framework*" yang diciptakan oleh globalisasi itu sendiri. Dia mengusulkan agar semboyan "*think globally, act locally*" ditinjau kembali. Dalam melawan globalisasi kita memerlukan suatu "*grassroot liberation*" yaitu secara kreatif mencari jalan untuk keluar dari himpitan system global. Kita memang harus sadar bahwa kita hidup dalam *global village* dan kita memiliki musuh bersama seperti Coca Cola, IMF, *World Bank* dsb. dan kita harus melakukan perlawanan, tetapi kita tidak memiliki "*centralized power*" untuk melakukan *global action*. Gustavo mengatakan yang perlu adalah mengembangkan *decentralized* dan *communal power*. Ia mengatakan: "*To make a difference, action should not be grandiously global, but humbly local.*" (hal. 441). Jadi *global thinking* harus diganti dengan *local thinking* yang dilakukan ditingkat *grassroot* (melalui *Community Development*). Kita harus percaya dengan semboyan lama "berdikari", karena bagaimana kita dapat melawan 5 perusahaan raksasa dunia yang menguasai 85% penjualan gandum dan 50% produksi? Atau empat raksasa yang mengontrol konsumsi ayam dunia? Apakah kita akan menunggu munculnya suatu raksasa "*multinational consumer coalition*?" atau "*global consciousness about the right way to eat*?"

Kita semua memerlukan politik "*no*" yaitu "*sharing rejection of the same evils*". Bagaimanapun suatu perusahaan global pasti harus mendarat di *local level*, jadi disitulah kita harus melawannya, yaitu dengan gerakan komunitas. Saat ini kita melihat gejala yang sebaliknya di masyarakat kita, dimana hampir semua daerah mengundang *investor* untuk membangun *Mal*, sehingga pasar tradisional mereka terdesak. Mengapa kita harus membeli bahan makanan atau minuman (yang sebetulnya bisa kita hasilkan sendiri) dari suatu pasar swalayan global yang memasukan bahan makanan tersebut dari negara lain?, "*Bringing our food closer and closer, we are empowering ourselves*, demikian kata Gustavo dan selanjutnya: "*Self-sufficiency and autonomy are now new political demand We have to resist global monoculture*" (hal 422). Kita tidak perlu menunggu hasil dari gerakan LSM yang berskala global (dengan mengadakan konferensi dan kesepakatan internasional), karena konferensi tersebut sering tidak ditindaklanjuti.

Kita memerlukan pembangunan sosial-budaya

Setelah berlangsung lima dekade (sejak tahun 50 an) konsep "pembangunan" yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*), ternyata tidak berhasil membangun harkat, martabat dan peradaban manusia secara hakiki. Berdasar data agregat yang berskala dunia PBB menyimpulkan bahwa pembangunan tidak mampu menghasilkan lapangan kerja secara memadai (*jobless growth*), cenderung hanya menguntungkan sebagian orang tetapi secara "kejam" menyisakan lebih dari satu milyar orang miskin di dunia ini (*ruthless growth*). Pembangunan yang terlalu materialistik telah mencabut manusia dari kebudayaan, sehingga menyesatkan manusia dari nilai-nilai idealnya (*rootless growth*). Pembangunan yang

teknokratik sangat bersifat deterministik dan tidak mendengar suara rakyat (*voiceless growth*). Kerakusan pembangunan telah menghancurkan lingkungan hidup manusia sehingga mengancam kelangsungan hidup di masa depan (*futureless growth*) Human Development Report 1997).

Kesalahan konsep pembangunan tersebut telah menghasilkan krisis dalam kehidupan sosial yang ditandai oleh munculnya budaya koruptif, kekerasan, kemiskinan, perkosaan hak asasi manusia dsb. Kesadaran bersama tentang perlunya suatu pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran yang merata sekaligus kualitas kehidupan bermasyarakat mendorong bangsa-bangsa di dunia menyelenggarakan "World Summit for Social Development" yang dihadiri tak kurang dari 185 negara dan 117 pemimpin pemerintahan. Konsep pembangunan sosial menjadi penting untuk menyeimbangkan (bukan menggantikan) konsep pembangunan fisik dan ekonomi dalam rangka menghasilkan "integrated development" yang dapat menghasilkan suatu perubahan menuju masyarakat yang baik (*good society*) (Bellah 1992).

Pembangunan sosial lebih luas dari sekedar pengentasan kemiskinan atau pemerataan pendapatan, bukan hanya pengembangan sumberdaya manusia, bukan sekedar penyediaan *social services* (perumahan, kesehatan, pendidikan, *criminal justice*). Pembangunan sosial menyentuh hal yang amat mendasar yaitu pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat terutama melalui pengembangan partisipasi (Bromley, 2003).

Oleh karena itu "perencanaan sosial" harus menjadi "perencanaan untuk dan bersama rakyat (*planning for the people and with the people*). Untuk mencapai itu diperlukan suatu ilmu dan keahlian yang khusus yaitu manajemen pembangunan sosial yang mampu melakukan "penjajakan aspirasi dan opini masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan partisipasi dalam pengambilan keputusan, ketrampilan merencanakan pembangunan komunitas, mengelola konflik, mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat lokal, sampai dengan penyusunan suatu kebijakan sosial.

Hal lain yang amat mendasar dari pembangunan sosial adalah membangun nilai-nilai dasar yang mencerminkan "cita-cita ideologis, etis, moral dan peradaban umat manusia. Karena itu, tujuan pembangunan sosial adalah suatu "pembangunan yang berorientasi nilai", bukan pembangunan yang menciptakan "one dimensional man" (manusia yang hanya berdimensi *materialistic*).

"Gerakan Sosial" Kebangkitan Budaya Nasional

Bangsa kita saat ini jelas sedang mengidap suatu "cultural deficiency" (kemiskinan budaya), tetapi kita harus sadar bahwa kebudayaan bukanlah sesuatu yang melekat (*inherent*) pada suatu masyarakat atau bangsa. Kita dapat merubahnya, persoalannya: "Apakah kita telah membangun budaya kita selama ini?". Setelah pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Orde Baru hingga sekarang mampukan kita menjawab secara terukur perkembangan kualitas kehidupan sosial-budaya kita, misalnya: "apakah masyarakat Indonesia semakin rukun?", semakin mandiri?, semakin peduli?".

Pembangunan "berorientasi nilai" adalah suatu pembangunan seluruh aspek kehidupan bangsa (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang dilandasi dan

diorientasikan pada nilai-nilai strategis tertentu. Keberhasilan pembangunan seperti ini bukan hanya dinilai dari pencapaian kuantitatif suatu sektor, tetapi terutama tertanamnya nilai-nilai budaya bangsa yang telah kita targetkan. Pembangunan nilai tidak boleh direduksi kedalam pembangunan sektoral, misalnya "sektor budaya". Pembangunan nilai harus menjadi suatu pembangunan "societal" (mencakup seluruh bidang kehidupan).

- Gerakan sosial ini harus didukung disepakati secara nasional (consensus nasional) mulai dari pimpinan negara (presiden dan lembaga perwakilan rakyat, tokoh masyarakat, universitas, LSM, pengusaha dsb.)
- Gerakan ini perlu difasilitasi oleh pemerintah tetapi tidak dikendalikan oleh pemerintah (gerakan seluruh masyarakat Indonesia).
- Motor gerakan ini adalah organisasi "*civil society*" yang menjalin jaringan mulai dari pusat sampai daerah.
- Nilai strategis yang akan dikembangkan (*strategic values*) perlu disepakati oleh semua golongan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila.
- Penanaman nilai-nilai ini tidak dengan cara "indoktrinasi" oleh pemerintah tetapi dilaksanakan oleh rakyat, bukan dengan cara penataran tetapi lebih bersifat *action oriented* (melalui kegiatan nyata).
- Penanaman nilai bukan hanya merupakan perubahan kultural tetapi juga perlu ditopang secara konsisten oleh perubahan struktural dalam masyarakat (Undang-undangan, peraturan, kelembagaan dsb.)
- Nilai strategis yang akan dikembangkan harus berskala nasional, akan tetapi masyarakat di daerah dapat mengembangkan nilai-nilai tersebut secara kreatif menurut cara hidup dan kondisi budaya setempat. Pengembangan nilai budaya lokal tidak dihambat.
- Nilai-nilai ini harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menarik bagi investor asing.
- Presiden perlu menggerakkan dan mengontrol birokrasi pemerintah agar menyesuaikan peraturan dan program yang ada dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini perlu dievaluasi dengan menggunakan indikator tertentu.
- Setiap tahun perkembangan nilai-nilai tersebut perlu dipantau dengan menggunakan indikator yang dirancang khusus. Presiden harus melaporkan perkembangan ini di depan wakil rakyat dan perlu melakukan perbaikan bila nilai-nilai tersebut tidak berkembang dengan baik.
- Nilai-nilai yang perlu ditanamkan menurut peninjauan yang telah

dilakukan oleh Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) adalah: nilai kemandirian, kerukunan nasional dan anti korupsi.

Referensi

Bellah, Robert N. *The Good Society*. New York: Random House, 1992.

Bromley, Ray. "Social Planning: Past, Present and Future" in Journal of International Development. Oct 7,15, 2003.

Esteva Gustavo and Madhu Suri Prakash "From Global to Local Beyond Neoliberalism to the International of Hope" in the Globalization Reader, ed. Lechner Frank J. and John Boli. Oxford: Blacwell, 2004.

Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1989.

UNDP. *Human Development Report 1997*. New York: Oxford University Press, 1997.

Wirutomo, Paulus. "Mencari Bentuk Indonesia Baru: Transformasi, Reformasi atau Deformasi Budaya?". Makalah tidak diterbitkan 2000.

